



# Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

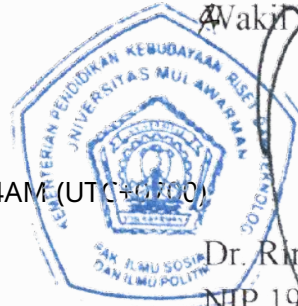
## ORIGINALITY REPORT

The first page of your submissions is displayed below.

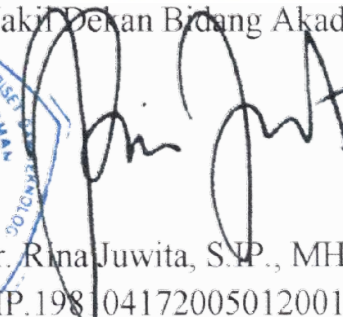
Submission author: Mardaniah Adji Hasanah Putri  
 Assignment title: Jurnal  
 Submission title: IMPLEMENTASI FEMICIDE LAW DI HONDU  
 File name: jurnal\_hi\_mardaniah\_adji\_1702045029.docx  
 File size: 55.53K  
 Page count: 17  
 Word count: 6,872  
 Character count: 46,452  
 Submission date: 16-May-2024 11:14AM (UTC+0700)  
 Submission ID: 2380715827

# 9%

## SIMILARITY INDEX



Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Rina Juwita, S.P., MHRIR  
 NIP.198104172005012001

**IMPLEMENTASI FEMICIDE LAW DI HONDURAS**  
 Mardaniah Adji Hasanah Putri

**Abstract:** In 2013, Honduras included femicide as a specific crime in an amendment to its constitution (Honduras Penal Code). The Honduran government has a ratified several international conventions related to the protection of women and their rights, which is in conflict with the abortion ban policy in Honduras. This gives rise to an interesting applicable theoretical policies where the policy is possible, however is a form of femicide. The research method used in this research is descriptive research and the type of data used is primary data in the form of legal documents and secondary data from books, journals, articles or from other sources. This research uses the approach of qualitative research and concludes how to analyze the implementation of femicide law in Honduras. The results of this research are that Honduras needs to improve its present system, increase government responsibility, improve monitoring and punishment strategy as because of the high level of impunity and many factors that are conditional in the constitution to the legal values of femicide itself.

**Keywords:** Femicide, Gender-based Violence, Honduras

**Pendahuluan**  
 Pada tahun 2013, Honduras telah memasukkan *femicide* sebagai spesifikasi kejahatan khusus dalam amandemen undang-undang (*Honduras Penal Code*). Cara mengimplementasikan hukum pada negara kepulauan ini secara mendasar: *The Law Against Trafficking of Persons and a Revised Penal Code* (Sánchez Toranzo, Walter (2008) : 116). Menurut *Honduras Penal Code*, kejahatan *femicide* didefinisikan sebagai seorang pria yang menabrak seorang wanita karena dia berinteraksi dengan kekerasan dan penganiayaan atau karena dia sebagai seorang wanita. *Femicide* juga dikenal sebagai pembunuhan, adalah bentuk paling ekstrem dari pelanggaran terhadap gender yang *Gender-Based Violence* (GBV) dan didefinisikan sebagai "pembunuhan yang bertujuan untuk perempuan karena mereka perempuan".  
 Krim ini tidak hanya berfokus pada korban angka pembunuhan perempuan hamil dan secara sosial dapat ditakutkan. Jumlah pembunuhan terhadap perempuan Honduras status hukum aborsi tidak menguraikan aborsi ini sendiri, melainkan berdampak pada pelaksanaan perempuan yang anak-anaknya. Banyak perempuan yang mengalami aborsi dengan menggunakan metode yang tidak aman dan seringkali berbahaya, yang memiliki konsekuensi yang merusak kesehatan dan mengakibatkan resiko kematian.  
 Di negara-negara yang mengimplementasikan aborsi seperti Honduras, aborsi ilegal adalah penyebab utama kematian terkait kehamilan, dan sekitar setengah dari semua perempuan memerlukan perawatan untuk komplikasi terkait aborsi, namun tidak semua mampu mengakses fasilitas kesehatan tersebut. Diperkirakan, akibat ekonomi. Hal ini menggaris-bawahi pentingnya aborsi yang diizinkan di Honduras berdampak terhadap implikasi kesehatan perempuan di negara tersebut yang dapat dikaitkan sebagai salah satu bentuk *femicide*. *Femicide* sendiri di Honduras didefinisikan sebagai sebuah konsep yang mengacu pada pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan di Honduras sejak tahun 1990.  
 Penelitian hukum ini membahas bagaimana implementasi aborsi menjadi lebih efektif atau, sebaliknya, melainnya memaksa perempuan untuk memperjuangkan biaya dan kesehatan mereka dengan mencari perawatan aborsi yang tidak aman. Status hukum